

Judul : Revisi UU Haji dan Umrah, BP Haji berpeluang jadi Kementerian
Tanggal : Kamis, 21 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Haji Dan Umrah

BP Haji Berpeluang Jadi Kementerian

KETUA Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebut ada peluang besar Badan Penyelenggara (BP) Haji berubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan status itu bisa diwujudkan dalam revisi Undang-Undang (UU) tentang Haji dan Umrah.

Marwan mengungkapkan, Pemerintah sudah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait revisi UU tersebut ke DPR. "Peluangnya cukup besar lewat revisi UU Haji dan Umrah," jelas Marwan di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Dia mengatakan, revisi UU Haji berpotensi dirampungkan bulan ini. Salah satu alasannya adalah, pihak Arab Saudi sudah mendesak Indonesia mengambil kepastian terkait area tenda Arafah yang akan ditempati jemaah haji Indonesia tahun 2026.

Sedangkan dalam UU Haji saat ini disebutkan bahwa penyelenggaraan haji masih berada di Kemenag. "Jadi di UU-nya nggak ada, lalu Kemenag menyodori usulan, BP Haji menyodori usulan, kan pusing nih.

Karena itu kita harus selesaikan di Agustus ini," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid menambahkan, pada masa sidang ini komisi-nya fokus pada pembahasan revisi UU Haji. Salah satu poin penting yang terus diperjuangkan adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. "Hal ini sudah lama kami usulkan, bukan baru sekarang" tegasnya.

Hidayat mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, efisien, dan bebas dari persoalan yang kerap terjadi di masa lalu. Namun, untuk mencapai hal itu, terlebih dulu harus menyelesaikan dua aspek sekaligus, yakni urusan dalam negeri dan luar negeri.

Di dalam negeri penyelenggaraan haji membutuhkan struktur hingga ke daerah-daerah agar pelayanan kepada jemaah berjalan maksimal. Sementara itu di luar negeri khususnya Saudi, otoritas haji hanya setara dengan



Marwan Dasopang

kementerian bukan badan. Di Saudi, kementerian hanya berhubungan dengan kementerian.

"Jika hanya badan, maka tidak setara dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru termasuk kesulitan menyelesaikan persoalan teknis di lapangan," tegas wakil ketua MPR itu.

Berbagai persoalan seperti

keterlambatan layanan, permasalahan jemaah antar anggota keluarga, hingga masalah syaria-rikah berpotensi terulang. "Makanya, kami mendorong Pemerintah segera membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang memiliki legitimasi kuat, baik di dalam negeri maupun di hadapan otoritas Saudi," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengungkap adanya usulan BP Haji dijadikan kementerian khusus mengurus haji dan umrah. Politikus Partai Golkar itu mengatakan, usulan ini ditujukan agar tidak memberatkan Kemenag.

Adies mengakui penyelenggaraan haji dan umrah kerap bermasalah. Alasan ini disebut juga mendasari usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. "Khusus untuk mengawal, dan juga mengawasi penyelenggaraan haji dan umrah, karena jemaah Indonesia terbanyak di dunia," ujarnya.

Dia meyakini Pemerintah memiliki cara memitigasi kendala yang akan terjadi jika BP Haji diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Hal itu telah dibuktikan saat Pemerintah memisahkan Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasaran.

"Kemungkinan ada Dirjen-dirjen ditarik ke BP Haji, tapi ini nanti melalui pembahasan. Jadi, kita lihat saja pembahasannya nanti seperti apa," tutupnya. ■ **PYB**